

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan pelaksanaan rencana, ide, atau kebijakan yang telah disusun dengan matang dan terperinci. Dalam konteks ini, implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi merupakan tindakan terencana yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut beberapa ahli, seperti Usman (2002) dan Mulyasa (2013), implementasi mencakup mekanisme sistematis yang mengubah input (tujuan dan isi) menjadi rangkaian tindakan operasional yang memberikan dampak positif, seperti perubahan pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada perencanaan yang baik serta pelaksanaan yang konsisten dengan norma-norma tertentu.

Dalam praktiknya implementasi dapat melibatkan berbagai pihak dan memerlukan koordinasi yang efektif antara pembuat kebijakan dan pelaksana. Proses ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan budaya, serta sumber daya yang tersedia. Sebagai contoh, dalam konteks Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Program ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok usaha di berbagai daerah. Implementasi kebijakan ini melibatkan pendampingan kelompok masyarakat untuk mendapatkan akses ke program pemberdayaan dari pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dari daerah tersebut.

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi

ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar Kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004)

Kriteria kemiskinan di Indonesia telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan rumah tangga atau individu yang tergolong miskin. Kriteria kemiskinan di hitung menggunakan Pendekatan Garis Kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menggunakan Pendekatan Garis Kemiskinan untuk menentukan status kemiskinan. Garis kemiskinan didefinisikan sebagai jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan non-makanan.

Data kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 19,48%. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 1,13 juta orang, menurun 13.540 orang terhadap Maret 2023 dan menurun 21.600 orang terhadap September 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 1,13 juta orang, menurun 13,54 ribu orang

terhadap Maret 2023 dan menurun 21,60 ribu orang terhadap September 2022. (2024).

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 8,57 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 9,12 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 23,41 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 23,76 persen. Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp527.275,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp403.922. (76,61 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp123.353,- (23,39 persen). (2024.)

Tabel 1.1 Data Kemiskinan di Provinsi NTT 2024

Kabupaten	Persentase Miskin	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin
Sumba Tengah	30%	92,31	27,159
Sabu Raijua	28%	96,313	26,949
Sumba Barat Dayak	27%	340,006	91,200
Sumba Timur	27%	269,728	72,000
Sumba Barat	26%	152,407	39,000
Rote Ndao	25%	152,613	38,153
Manggarai Timur	24%	297,967	71,592
TTS	24%	459,600	110,304
Lembata	24%	139,787	33,594
Ende	22%	282,467	62,115
Kupang	21%	379,464	79,668
TTU	20%	266,293	53,258
Alor	19%	216,629	41,158
Manggara	19%	342,558	65,079
Manggara Barat	16%	282,943	45,270
Malaka	13%	204,735	26,615
Belu	13%	193,306	29,150
Nagekeo	12%	165,098	19,811
Ngada	11%	171,865	18,905
Sikka	11%	326,999	35,970
Flores Timur	11%	291.412	32,055
Kota Kupang	8%	455,502	36,440

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2024

Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Ibu Kotanya adalah Betun. Malaka merupakan hasil pemekaran

dari Kabupaten Belu yang disahkan dalam siding paripurna DPR RI pada 14 desember 2012. Berdasarkan posisi geografisnya berbatasan dengan Kabupaten Belu di utara, Laut Timor di selatan, Negara Timor Leste di timur, serta Kabupaten TTU dan TTS di bagian barat. Secara administratif, Kabupaten Malaka yang memiliki luas wilayah mencapai 1.160,63 Km², terbagi atas 12 kecamatan serta 127 Desa. Kabupaten Malaka memiliki jumlah penduduk sebanyak 204.735 jiwa, dengan jumlah kemiskinan 26.615 jiwa. Khususnya desa Kletek yang terletak di Kecamatan Malaka Tengah yang memiliki jumlah Penduduk 3.870 jiwa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga pemerintah mengeluarkan bantuan berupa RASKIN untuk masyarakat yang kurang mampu.

**Tabel 1.2 Data Kemiskinan Per-Kecamatan
di Kabupaten Malaka**

NO	KECAMATAN	PENDUDUK	PENDUDUK MISKIN
1	Malaka Tengah	44,627	10.447
2	Malaka Barat	26,197	4.150
3	Wewiku	21.620	2.870
4	Weliman	23.211	3.060
5	Rinhat	16.296	2.151
6	Io Kufeu	9.424	1.078
7	Sasitamean	9.790	1.090
8	Laen Manen	14.761	1.870
9	Malaka Timur	11.422	1.179
10	Kobalima Timur	7.085	790
11	Kobalima	20.740	2.650
12	Botin Leo Bele	5.735	843
Jumlah		204.735	26.615

Sumber : PEMKAB MALAKA, disdukcapil

Data kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya di Kabupaten Malaka menunjukkan beberapa indikator yang perlu diperhatikan.

Pertama, Pengeluaran Per Kapita, pada tahun 2021, pengeluaran per kapita di Kabupaten Malaka sebesar Rp 645.871,-. Ini menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Malaka memiliki pengeluaran yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di NTT. (BPS Kab. Malaka) (2024)

Kedua, Kualitas Perumahan, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Malaka memiliki rumah dengan luas 20-49 m² (44,47%) dan sekitar 48,14% dengan luas 50-99 m² atau lebih. Namun, masih banyak rumah tangga yang memiliki kualitas lantai yang kurang memenuhi standar kesehatan, yaitu sekitar 13,74% rumah tangga masih memiliki lantai tanah. (BPS Kab. Malaka) (2024)

Ketiga, Fasilitas Perumahan, mayoritas penduduk di Kabupaten Malaka menggunakan sumur (50,16%) dan mata air (29,46%) sebagai sumber air minum. Namun, masih banyak rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas pembuangan air besar, yaitu sekitar 8,20%. (BPS Kab. Malaka) (2024)

Terakhir, Kemiskinan, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia. Di Kabupaten Malaka, pemerintah telah menggelirkan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan, namun masih banyak program yang dianggap belum tepat sasaran atau belum efektif.

RASKIN (Beras untuk Keluarga Miskin) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial kepada keluarga miskin. Program ini memberikan subsidi pangan berupa beras kepada rumah tangga berpenghasilan rendah. Mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok berupa beras, Mencegah penurunan konsumsi energi dan protein, Meningkatkan/membuka akses

pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan, Membantu kelompok miskin dan rentan miskin mendapatkan cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa kendala.

Program RASKIN (Beras untuk Keluarga Miskin) adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2002 sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga berpenghasilan rendah, terutama mereka yang tergolong miskin dan rentan miskin. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan menyediakan beras berkualitas yang dijual dengan harga subsidi, yaitu Rp 1.600 per kilogram. Setiap RTS berhak menerima 15 kg beras per bulan, yang didistribusikan melalui titik distribusi yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Proses distribusi melibatkan berbagai pihak, termasuk Perum Bulog dan perangkat desa, untuk memastikan bahwa bantuan sampai ke tangan penerima manfaat secara efektif.

Program RASKIN (Beras untuk Rakyat Miskin) memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar rumah tangga dapat menjadi penerima RASKIN yaitu Kepemilikan Kartu Raskin, Kriteria Ekonomi, Penetapan Oleh Pemerintah Setempat, Terdaftar Dalam Basis Data Terpadu, Ketentuan Penerimaan Raskin, Verifikasi Data. Program RASKIN merupakan program nasional, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan sesuai dengan alokasi yang diberikan. Dengan memenuhi persyaratan-persyaratan di atas, rumah tangga dapat dipertimbangkan untuk menjadi penerima manfaat program RASKIN. Penting untuk dicatat bahwa implementasi program ini dapat bervariasi di berbagai daerah, dan pemerintah setempat mungkin memiliki kriteria tambahan atau modifikasi berdasarkan kondisi lokal.

Pelaksanaan dalam program RASKIN ini mencakupi beberapa poin penting terkait pelaksanaan program RASKIN (Beras Untuk Rakyat Miskin) di antaranya adalah Penanggung Jawab: Penanggung jawab utama program Raskin adalah Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Di tingkat kabupaten/kota, Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya. Perum BULOG ditunjuk sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk mendistribusikan Raskin. Besaran Bantuan: Setiap Rumah Tangga sasaran penerimaan manfaat (RTS-SM) menerima 15 kg beras perbulan, Harga tebus Raskin ditetapkan sebesar Rp 1.600 per kg netto di titik distribusi. Sasaran Penerima: Program ini ditujukan untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu, mulai tahun 2016, penerimaan Raskin harus memiliki Kartu Raskin yang berisi biodata seperti nama kepala keluarga, alamat, dan jatah beras setiap bulan. Mekanisme Pelaksanaan: Bupati/Walikota mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin kepada Perum BULOG, BULOG mendistribusikan beras ke titik distribusi di tingkat desa/kelurahan, Pelaksana distribusi di tingkat desa/kelurahan menyalurkan beras kepada RTS-PM. Pengawasan dan Evaluasi: Dibentuk Tim Koordinasi Raskin di tingkat pusat hingga kecamatan untuk mengawasi pelaksanaan program, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh tim independent. Indikator Keberhasilan: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, tepat kualitas

Desa Kletek adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Desa ini memiliki sejarah yang erat dengan perkembangan wilayah Malaka sebagai bagian dari pulau Timor. Desa Kletek merupakan salah satu desa yang terletak di bagian selatan Kabupaten Malaka, berjarak sekitar 4 km dari pusat kecamatan. Masyarakat desa ini

sebagian besar berprofesi sebagai petani, dengan bahasa sehari-hari yang umum digunakan adalah bahasa Tetun, meskipun ada juga yang menggunakan bahasa Bunak dan Dawan. Jumlah penduduk di Desa Kletek berjumlah 2743 dan jumlah penduduk miskin 1.520 dari delapan dusun yang ada di desa Kletek.

Tabel 1.3 Data Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin

No	Nama Dusun/KK	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin
1	Rainain (80)	320	152
2	Rainain A (76)	329	108
3	Rainain B (82)	337	168
4	Suai A (62)	248	212
5	Maneklaran (69)	285	132
6	Suai B (181)	636	348
7	Beiudu (64)	292	132
8	Wefatuk (80)	296	268
Total	694	2743	1.520

Sumber : Kantor Desa Kletek 2024

Desa Kletek menghadapi tantangan serius terkait kemiskinan. Banyak rumah tangga di desa ini tergolong dalam kategori miskin, dengan pendapatan yang rendah dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Tingkat kemiskinan ini diperparah oleh rendahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, yang berkontribusi pada siklus kemiskinan yang sulit diputus. Maka dari itu munculnya program RASKIN bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok, terutama beras. Dengan memberikan subsidi beras, program ini membantu keluarga miskin untuk mengalokasikan anggaran mereka ke kebutuhan lain yang juga penting.

Dilakukannya pembagian beras RASKIN dari Pemerintah Desa untuk masyarakat di Desa Kletek terjadi setiap tiga bulan, bisa di awal tahun (januar-maret), pertengahan tahun (juni-agustus), dan akhir tahun (oktober-desember). Jadi setiap Kartu Keluarga (KK) bisa mendapatkan bantuan beras RASKIN sebanyak 10kg

masyarakat di Desa Kletek bisa mendapatkan bantuan RASKIN sebanyak tiga kali dalam tiga bulan tersebut.

Program Raskin (Raskin) di Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan di kalangan rumah tangga miskin. Pada tahun 2024 pemerintah memberikan bantuan kepada desa kletek di 8 (delapan) dusun diantaranya yaitu Dusun Rainain 38 Kepala Keluarga, Dusun Rainain A 27 Kepala Keluarga, Dusun Rainain B 42 Kepala Keluarga, Dusun Maneklaran 33 Kepala Keluarga, Dusun Suai A 53 Kepala Keluarga, Dusun Beidu 33 Kepala Keluarga, Dusun 7 Suai B 87 Kepala Keluarga, Dusun 8 Wefatuk 67 Kepala Keluarga. Total penerima bantuan di Desa Kletek adalah 387 Kepala Keluarga. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut, terutama bagi mereka yang tergolong dalam kategori kurang mampu.

Tabel 1.4 Data Jumlah Penduduk Penerimaan Bantuan Raskin di Desa Kletek

Dusun	Jumlah Kepala Keluarga
Dusun Rainain	38
Dusun Rainain A	27
Dusun Rainain B	42
Dusun Maneklaran	33
Dusun Suai A	53
Dusun Beidu	33
Dusun 7 Suai B	87
Dusun 8 Wefatuk	67
Total	387

Sumber :Berita Acara Serah Terima Bantua Raskin 2024 Desa Kletek

Adapun masalah atau kendala yang terjadi dalam pembagian beras Raskin di desa kletek, di antaranya Pertama, terdapat pada perbedaan NIK, Warga yang namanya

terdaftar sebagai penerima bantuan Raskin, namun NIK pada KTP dan NIK dalam daftar penerima berbeda, tidak dapat menerima bantuan beras tersebut. Kedua, Nama Tidak Terdaftar di Dusun, Terdapat penerima bantuan yang namanya tidak terdaftar di setiap dusun di Desa Kletek, meskipun nama tersebut tercatat dalam daftar penerima Raskin. Hal ini menyebabkan penerima bantuan tidak teridentifikasi, sehingga bantuan beras tidak dapat diberikan. Ketiga, Apabila terdapat warga yang telah meninggal, namun namanya masih tercatat dalam daftar penerima bantuan, maka pihak keluarga diharapkan untuk mengembalikan beras bantuan tersebut kepada pemerintah. Keempat, Gangguan Jaringan, Masalah lain yang sering muncul adalah gangguan pada jaringan. Karena setiap penerima diwajibkan untuk memfoto atau memindai barcode, gangguan jaringan dapat menghambat proses tersebut. Akibatnya, pembagian beras Raskin bisa memakan waktu hingga malam hari.

Apabila terdapat warga yang telah meninggal namun namanya masih tercatat dalam daftar penerima bantuan, maka pihak keluarga diharapkan untuk mengembalikan beras bantuan tersebut kepada pemerintah. Dalam wawancara yang saya lakukan dengan warga atas terganggunya jaringan sehingga memperlambat proses pembagian bantuan RASKIN adalah keterbatasan infrastruktur jaringan sehingga jika terjadinya koneksi internet yang melambat maka system pemindaian barcode tidak akan berjalan lancar dan proses verifikasinya akan terlambat. Masalah pada server atau system yang digunakan untuk memproses pemindaian barcode tergantung pada server yang terhubung melalui internet, gangguan jaringan pada internet maka server atau aplikasinya juga bisa terganggu sehingga server tersebut tidak dapat mengirim atau menerima data dengan cepat karena masalah jaringan.

**Tabel 1.5 Daftar Nama Tidak Tedaftar Di Dusun
Tetapi Masuk Dalam Daftar Penerima Bantuan 2024**

No	Nama	Dusun/RT/RW
1	Yonatas Ulu Manek	Rainain B, RT 006, RW 0
2	Alex Viktorius Seran	Rainain, RT, 003, RW 0
3	Wendelinus Massa	Suai B, RT 017, RW 0
4	Sabina Rika Sina	Beidu, RT 011, RW 0
5	Robertus Leki Taek	Suai B, RT 014, RW0
6	Patrisius Klau	Rainain, RT 002, RW 0
7	Melius Seran Atok	Rainain B, RT 006, RW 0
8	Ferdinandus Nahak S	Rainain, RT 003, RW 0
9	Vinsesius Timo Amaunut	Maneklaran, RT 010, RW 0
10	Yoseph Bere	Maneklaran RT, 015, RW 0
11	Adrianus Seran	Wefatuk, RT 018, RW 0

Sumber : Berita Acara Serah Terima Bantuan Raskin 2024

Tabel 1.6 Daftar Perbedaan NIK KTP Dan NIK Penerima

No	NAMA	NIK DALAM KTP	NIK DALAM DAFTAR PENERIMA
1	Laurensius Nahak	5304080107600061	5304080107590041
2	Ordinandus N. kehi	5304102012960002	5304102012860002
3	Herminus K. Berek	5304080107830112	5304082705690001
4	Stefanus Klau	5304080303680001	5304080107760070
5	Agustinus Mauk	5304081005600001	5304081302680001
6	Dominggus Nahak	5304083012810002	5304083112810006

Sumber : Berita Acara Serah Terima Bantuan Raskin 2024

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan mengangkat penelitian yang berjudul tentang **“Implementasi Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin), (Studi Kasus Di Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan penelitian yang telah kemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

“Bagaimana Implementasi Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) Di Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) Di Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh pada penelitian ini secara umum terbagi dalam dua kategori yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebijakan publik, pembangunan sosial, dan evaluasi program sosial. Berikut adalah manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

- a) Pengembangan Teori Implementasi Kebijakan Sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori implementasi kebijakan sosial, khususnya terkait dengan pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat desa.
- b) Kontribusi terhadap Pengembangan Evaluasi Program Sosial. Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi bagi pengembangan teori evaluasi program sosial, khususnya dalam konteks program bantuan pangan.

c) Penyusunan Kerangka Teoritis untuk Program Bantuan Sosial di Pedesaan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbang pada penyusunan kerangka teoritis terkait dengan penerapan program sosial di daerah pedesaan, terutama program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan.

d) Pemahaman yang Lebih Mendalam tentang Pengaruh Program Raskin terhadap Masyarakat Miskin. Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang dampak program Raskin terhadap kesejahteraan masyarakat miskin, yang dapat menjadi referensi untuk pengembangan teori pengaruh kebijakan sosial terhadap kelompok sasaran.

2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang langsung diterapkan untuk perbaikan pelaksanaan Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) di Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, serta program sosial serupa di wilayah lainnya.